

# Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 4 | 2025 | Edisi. Juni

## Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Sri Yunita<sup>1</sup>, Emiyani Teresia Br Ginting<sup>2</sup>, Olipia Sihol Marito Pakpahan<sup>3</sup>, Trikomala Sari Simatupang<sup>4</sup>

Universitas Negeri Medan

1. Dosen Prodi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

2. Mahasiswa Prodi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

[sr.yunita@unimed.ac.id](mailto:sr.yunita@unimed.ac.id) [Emiyaniginting06@gmail.com](mailto:Emiyaniginting06@gmail.com)  
[olipiapkphn.3243111012@mhs.unimed.ac.id](mailto:olipiapkphn.3243111012@mhs.unimed.ac.id) [trikomala.3243111055@mhs.unimed.ac.id](mailto:trikomala.3243111055@mhs.unimed.ac.id)

### ABSTRACT

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah elemen yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, yang berfungsi strategis untuk membentuk karakter individu yang aktif, bertanggung jawab, serta menghormati nilai-nilai kebangsaan dan hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan untuk meneliti perkembangan kurikulum PKn dari awal kemerdekaan hingga pelaksanaan Kurikulum Merdeka 2020. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini mengevaluasi perubahan kurikulum PKn dalam konteks sosial-politik yang selalu berubah, serta tantangan dalam pelaksanaannya, seperti metode pembelajaran yang kurang melibatkan siswa dan keterbatasan kemampuan guru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun PKn telah melewati berbagai perubahan positif dalam materi dan pendekatan, masih dibutuhkan inovasi dalam teknik pengajaran serta peningkatan kapasitas pengajar untuk menciptakan pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan konteks, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman.

**Kata Kunci:** *Hak Asasi Manusia, kurikulum, Pendidikan Kewarganegaraan, Kurikulum Merdeka, Pembentukan Karakter.*

# Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 4 | 2025 | Edisi. Juni

## PENDAHULUAN

Begitu vitaln dan penting posisi PKn dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak mengejutkan jika sejak masa kemerdekaan hingga sekarang, PKn terus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah lama dianggap sebagai komponen utama dalam sistem pendidikan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. PKn dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang penting untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di antara rakyat. Indonesia, dengan variasi budaya, etnis, dan agama yang sangat kompleks, menghadapi tantangan besar dalam menciptakan identitas nasional yang kuat dan harmonis. PKn di Indonesia meliputi berbagai aspek pendidikan yang tidak hanya terbatas pada pengetahuan mengenai hukum dan hak-hak warga, tetapi juga pada pengembangan sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat kebangsaan. Kurikulum PKn disusun untuk mengajarkan sejarah nasional, konstitusi, sistem pemerintahan, serta isu-isu terkini yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Di tengah suasana globalisasi, identitas nasional sering kali diuji oleh pengaruh budaya luar dan perubahan sosial yang berlangsung cepat. Globalisasi membawa arus informasi dan budaya dari berbagai penjuru dunia yang dapat memengaruhi cara pikir dan nilai-nilai generasi muda (Kandia, 2023).

Perkembangan PKn juga terkait erat dengan dinamika sosial-politik serta perubahan kebijakan pemerintah yang terus berlangsung seiring waktu. Sejak peluncuran kurikulum pertama pada tahun 1947, yang dikenal sebagai *leer plan*, hingga Kurikulum Merdeka pada tahun 2020, PKn telah mengalami banyak perubahan, baik dari segi nama, materi, maupun metodologi pengajaran. Dalam kurikulum 1975, misalnya, PKn bertransformasi menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang memiliki banyak muatan ideologis dari Orde Baru, sementara pada masa Reformasi muncul Kurikulum 2004 dan 2006 yang lebih fokus pada pengembangan kompetensi dan karakter warga negara. Kini, kita menggunakan Kurikulum Merdeka dengan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis profil Pelajar Pancasila. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa kurikulum PKn bukan hanya alat pendidikan, tetapi juga refleksi dari ideologi dan kepentingan penguasa pada saat itu. Dengan demikian, sangat penting untuk mengevaluasi bagaimana perubahan-perubahan ini berkontribusi dalam membentuk karakter dan identitas kewarganegaraan di Indonesia terutama bagi siswa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Azzahra, A. H. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Identitas Nasional. *jurnal riset sosial humaniora dan ilmu pendidikan*, 23-31.

# Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 4 | 2025 | Edisi. Juni

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang bertujuan untuk memahami berbagai fenomena sosial dan permasalahan manusia dengan menciptakan gambaran yang komprehensif dan kompleks yang bisa dijelaskan dengan kata-kata, menyajikan pandangan mendalam yang diperoleh dari sumber-sumber informan, serta berlangsung dalam konteks yang alami pada kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan oleh peneliti adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode yang melibatkan pengumpulan data melalui pemahaman dan analisis teori-teori dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Ada empat langkah dalam melakukan studi pustaka dalam penelitian, yaitu menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, menyusun bibliografi, mengatur waktu, serta membaca atau mencatat materi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari sumber dan menyusun informasi dari berbagai referensi, seperti analisis buku, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Materi pustaka yang diperoleh dari beragam referensi tersebut dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung argumen dan ide yang diusulkan (Adlini, 2022)

## PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, Bab I Pasal 1 ayat 19, kurikulum didefinisikan sebagai sekumpulan rencana dan pengaturan terkait tujuan, materi, dan bahan ajar serta metode yang digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan proses belajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Materi dan bahan ajar itu sendiri merujuk pada

---

Kandia, W. (2023). Sejarah Perjalanan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Indonesia. *journal of civic education research*.

Adlini, N. M. (2022). METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA. *jurnal pendidikan*.

Gollob, R., & Krapf, G. (2010). *Educating for Democracy: Background Materials on Democratic Citizenship and Human Rights Education for Teachers*. Strasbourg, France: Council of Europe Publishing.

# Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 4 | 2025 | Edisi. Juni

struktur dan konten studi yang ditujukan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang relevan demi mencapai tujuan pendidikan nasional.

Sementara itu, Kurikulum PKn sebenarnya berkaitan erat dengan transformasi masyarakat demokratis di Indonesia. Tanda dari hal ini dapat dilihat pada upaya mendalam untuk menginternalisasi nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemahaman mengenai hak asasi manusia mendorong pengenalan nilai-nilai martabat, kesetaraan, dan kebebasan sebagai hak dan nilai yang diperjuangkan melalui penguatan dan pelaksanaan hak asasi manusia di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, PKn dan peningkatan pemahaman tentang hak asasi manusia menjadi elemen yang sangat penting dalam upaya membentuk dan memperkuat identitas generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa (Racman, 2021)<sup>2</sup>.

Sejarah kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia berkaitan erat dengan perubahan sosial, politik, dan budaya sejak negara ini merdeka. Kurikulum awal yang diperkenalkan setelah kemerdekaan adalah Rentjana Pelajaran 1947, yang mencakup pelajaran Civic untuk membangun kesadaran bernegara. Selanjutnya, kurikulum ini ditingkatkan menjadi Rentjana Pelajaran Terurai 1952 dan Rentjana Pendidikan 1964 yang lebih fokus pada penanaman nilai-nilai nasionalisme. Di masa Orde Baru, kurikulum mengalami perubahan besar dengan pengenalan Kurikulum 1968 dan Kurikulum 1975 yang menjadikan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai elemen utama dalam pembentukan karakter peserta didik. Kurikulum 1984 dan 1994 tetap mempertahankan PMP dengan peningkatan pada konten dan metode pengajaran. Setelah era reformasi, muncul Kurikulum 2004 (KBK) yang mengadopsi pendekatan berbasis kompetensi, diikuti oleh Kurikulum 2006 (KTSP) yang memberikan otonomi lebih kepada sekolah. Dalam Kurikulum 2013, nama mata pelajaran ini berganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan mulai menekankan pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan yang seimbang. Terakhir, Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan pada tahun 2020 memberikan keleluasaan lebih kepada guru dan siswa dalam menggali nilai-nilai kewarganegaraan secara kontekstual dan berbasis proyek. Proses panjang ini menunjukkan bahwa kurikulum PPKn terus mengalami perkembangan sejalan dengan kebutuhan bangsa dan kemajuan zaman (Raharjo, 2020)<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Muhtaj, M. E. (2020). LITERASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI. *JURNAL HAM*.

Racman, F. (2021). Profisilisasi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum indonesia. *JURNAL ILMU PENDIDIKAN*.

# Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 4 | 2025 | Edisi. Juni

Modul pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia dibuat sebagai reaksi terhadap arus masyarakat dan keinginan pengajaran nasional yang diarahkan untuk membangun karakter warga negara yang cerdas, cakap, dan peduli. Dalam perkembangannya, PKn tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar kenegaraan, namun lebih dari itu, PKn juga menjadi kunci utama untuk menanamkan nilai-nilai aturan mayoritas dan hak asasi manusia (HAM) sejak dini. Pentingnya koordinasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam program pendidikan Kewarganegaraan muncul dari kebutuhan untuk menumbuhkan pemahaman peserta didik tentang penghormatan terhadap manusia, keseragaman dan fleksibilitas. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memberdayakan pengaturan sikap dan perilaku bersama yang mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Program pendidikan semacam itu diuraikan untuk menumbuhkan kesadaran sosial dan memberi energi pada kerja sama dinamis siswa dalam masyarakat yang berdasarkan hukum dan multikultural.

Persiapan pembelajaran berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia tidak hanya menekankan pada sudut pandang kognitif, tetapi juga pada pengembangan sikap dan aktivitas. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran PKn diantisipasi agar partisipatif dan relevan. Peserta didik tidak hanya diberikan informasi yang sudah baku tentang hukum dan pemerintahan, tetapi lebih dari itu, mereka dipersilakan untuk mengkaji, menganalisis isu-isu nyata, dan mengasah nilai-nilai tersebut dalam standar kehidupan di dalam kelas.

Pada kenyataannya, penguatan nilai-nilai hak asasi manusia dalam modul pendidikan Kewarganegaraan masih menghadapi sejumlah tantangan. Banyak pendidikan yang bersifat instruksional masih menekankan pada pendekatan pengulangan dan penyimpanan materi yang tidak aktif. Hal ini menekan lahirnya pertimbangan dasar di antara para peserta didik. Di sisi lain, tidak semua guru memiliki kompetensi yang memadai untuk mengkoordinasikan isu-isu hak asasi manusia dan nilai-nilai multikultural secara layak dalam pengajaran.

Dalam mengatur PKn untuk menghasilkan warga negara yang fleksibel dan inklusif, program pendidikan harus diuraikan secara lengkap, tidak hanya dari segi substansi, tetapi juga strategi penyampaian dan penguatan kapasitas instruktur. Pelajaran kewarganegaraan seharusnya menjadi ruang bagi pengaturan warga negara yang tidak hanya mampu memahami hukum dan kerangka kerja pemerintah, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap isu-isu sosial, perbedaan, dan kesetaraan. Melalui pendekatan seperti itu, para siswa dapat menjadi operator perubahan sosial yang mampu membangun kehidupan sosial yang selaras dan adil (Muhtaj, 2020).

**Identifikasi Kebutuhan Nilai dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Multikultural**

# Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 4 | 2025 | Edisi. Juni

Dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia, pentingnya pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan sangatlah besar. Indonesia terdiri atas beragam suku, agama, budaya, dan bahasa yang hidup berdampingan dalam satu wilayah negara. Hal ini menuntut sistem pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan, untuk dapat menginternalisasi nilai-nilai seperti toleransi, demokrasi, keadilan, keberagaman, inklusi, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut diperlukan agar siswa tidak hanya memiliki pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan prinsip hidup berdampingan dalam keragaman. Pendidikan multikultural dalam Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk karakter warga negara yang menyadari hak dan kewajibannya, serta mampu menerima perbedaan sebagai potensi, bukan ancaman. Proses ini membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai yang bersifat praktis dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya teori belaka. Misalnya, melalui pembelajaran yang menekankan dialog, kerja kelompok, dan pemecahan masalah secara demokratis. Pendekatan semacam ini memperkuat pemahaman siswa mengenai pentingnya keadilan sosial, hak yang setara, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Prinsip-prinsip pendidikan multikultural yang dikembangkan oleh James A. Banks, seperti integrasi materi, pengurangan prasangka, dan penciptaan budaya sekolah yang inklusif, menjadi landasan dalam pembelajaran Kewarganegaraan. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya diajak untuk mengenali keberagaman, tetapi juga belajar untuk hidup dan bekerja sama di dalamnya. Pendidikan multikultural berfungsi sebagai sarana untuk membangun empati sosial, memperkuat solidaritas, dan mencegah konflik yang muncul akibat prasangka antar kelompok sosial.

Dalam Kurikulum Nasional, baik Kurikulum 2013 (K13) maupun Kurikulum Merdeka, nilai-nilai yang dikembangkan dalam mata pelajaran Kewarganegaraan mencakup Pancasila sebagai nilai dasar, demokrasi, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya. Kurikulum ini dirancang agar siswa tidak hanya memahami teori kewarganegaraan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam sikap dan tindakan. Kurikulum Merdeka secara khusus memberi ruang lebih besar untuk pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan secara kontekstual dan kolaboratif.

Peran nilai dalam Kewarganegaraan sangat penting dalam pembentukan karakter kewarganegaraan. Nilai-nilai seperti toleransi, tanggung jawab sosial, dan inklusi membantu membentuk warga negara yang peduli, aktif, dan menyadari dinamika sosial di sekitarnya. Kewarganegaraan bukan hanya sekadar mata pelajaran normatif, tetapi juga merupakan sarana untuk membentuk moral publik yang menghargai kedamaian dan keadilan sosial. Dengan cara ini, pendidikan

# Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 4 | 2025 | Edisi. Juni

tidak hanya menghasilkan warga negara yang patuh hukum, tetapi juga mereka yang mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat multikultural<sup>4</sup>.

## **Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Program Sistemik Pendidikan Multikultural**

Pendidikan Kewarganegaraan memainkan peran penting dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk hidup berdampingan secara damai dalam lingkungan multikultural. Meskipun demikian, penilaian terhadap kurikulum PKn menunjukkan bahwa memasukkan nilai-nilai multikultural masih menghadapi beberapa kendala. Hambatan utama adalah kesulitan dalam mengadaptasi kurikulum dengan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sebuah studi oleh Susilawati dkk. (2024) menemukan bahwa kurikulum yang ada saat ini kurang memenuhi kebutuhan masyarakat multikultural, dan menyoroti perlunya perbaikan yang lebih baik dalam menanggapi konteks yang beragam.

Selain itu, penerapan pendidikan multikultural dalam mata pelajaran PKn menghadapi keterbatasan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru yang diperlukan untuk secara efektif memasukkan nilai-nilai ini ke dalam metode pengajaran mereka. Wijayanti dkk. (2024) menyoroti kebutuhan kritis akan pelatihan guru untuk menumbuhkan suasana pendidikan inklusif yang menghargai keragaman budaya.

Untuk mengatasi masalah ini, strategi untuk mengembangkan kurikulum PKn harus mencakup:

1. Memasukkan Nilai-nilai Multikultural: Menciptakan sumber daya pendidikan yang mencerminkan keragaman budaya Indonesia yang kaya, yang memungkinkan siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan.
2. Pengembangan Guru: Melaksanakan sesi pelatihan untuk para pendidik yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan perspektif multikultural dalam pengajaran PKn.
3. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Melibatkan berbagai kelompok, seperti masyarakat dan orang tua, dalam proses desain kurikulum untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan program.
4. Evaluasi Berfokus pada Multikulturalisme: Menetapkan kerangka penilaian yang mampu mengukur pemahaman dan sikap siswa secara holistik terhadap prinsip-prinsip multikultural.

Dengan menerapkan pendekatan-pendekatan ini, ada optimisme bahwa Pendidikan Kewarganegaraan akan beroperasi sebagai inisiatif sistematis yang

---

<sup>4</sup> Nangala, A. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Multikultural. *jurnal soshum insentif*.

# Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 4 | 2025 | Edisi. Juni

bermakna dalam mempromosikan nilai-nilai multikultural, mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang toleran, inklusif, dan patriotik<sup>5</sup>.

## **Adaptasi Pembelajaran PKn untuk Membangun Warga Negara Multidimensiona**

Dalam menghadapi kompleksitas dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin meningkat, penyesuaian pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi kebutuhan mendesak untuk menghasilkan warga negara yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual. Konsep kewarganegaraan multidimensional mengharuskan adanya perubahan dalam metode pembelajaran PKn untuk mempersiapkan siswa dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, serta kemampuan untuk berpartisipasi aktif di masyarakat. Berdasarkan Kamaliah, Al Sadad, dan AS (2023) dalam jurnal *Educendikia*, paradigma terbaru dalam pengajaran PKn di sekolah dasar fokus pada pengembangan kecerdasan sipil, tanggung jawab sipil, dan partisipasi sipil. Kecerdasan sipil mencakup penguatan dimensi kognitif, afektif, dan spiritual peserta didik dalam memahami isu-isu kewarganegaraan. Tanggung jawab sipil mendorong munculnya kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, sedangkan partisipasi sipil mengajak siswa untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial dan politik dengan penuh tanggung jawab. Dengan cara ini, penyesuaian pembelajaran PKn yang menggabungkan ketiga dimensi itu menjadi metode yang efektif untuk menciptakan warga negara yang kritis, partisipatif, dan berkarakter multidimensional<sup>6</sup>.

## **KESIMPULAN**

Pendidikan warga negara Indonesia (kewarganegaraan) memainkan peran strategis dalam desain warga negara demokratis, moral dan nasionalis. Kurikulum warga mengalami perubahan besar pada waktu -waktu tertentu, yang mencerminkan pertumbuhan dinamika sosial, politik dan budaya. Integrasi nilai-nilai hak asasi manusia dan multikulturalisme dalam kurikulum sipil adalah langkah positif untuk menanggapi berbagai tantangan masyarakat Indonesia. Namun demikian, implementasi kewarganegaraan tetap terlihat dalam berbagai hambatan, termasuk kurangnya metode pembelajaran partisipatif dan kemampuan guru yang tidak merata. Oleh karena itu, penilaian berkelanjutan tentang

---

<sup>5</sup> Wijayantu. (2024). Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Pkn di Sekolah Dasar Dengan Membangun Kesadaran Pluralisme Sejak Dini. *jurnal pendidikan karakter*.

<sup>6</sup> Riska, A. (2024). Paradigma Baru Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar dalam Membentuk Karakter Siswa di Era Revolusi industri 4.0. *jurnal ilmiah pendidikan*.

# Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 4 | 2025 | Edisi. Juni

pentingnya memperkuat pelatihan guru, mengembangkan materi yang berhubungan dengan konteks, dan meningkatkan kewarganegaraan sangat penting. Penguatan ini diharapkan dapat menciptakan warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu hidup dalam harmoni dalam masyarakat yang pluralistik.

# Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 4 | 2025 | Edisi. Juni

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldini, M. N. (n.d.). METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA . *jurnal pendidikan*.
- Azzahra, A. H. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membanhun Identitas Nasional. *jurnal riset sosial humaniora dan ilmu pendidikan*, 23-31.
- Gollob, R., & Krapf, G. (2010). *Educating for Democracy: Background Materials on Democratic Citizenship and Human Rights Education for Teachers*. Strasbourg, France: Council of Europe Publishing.
- Kandia, W. (2023). Sejarah Perjalanan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Indonesia. *journal of civic education research*.
- Muhtaj, M. E. (2020). LITERASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI. *JURNAL HAM*.
- Nangala, A. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Multikultural. *jurnal soshum insentif*.
- Racman, F. (2021). Profisilisasi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum indonesia. *JURNAL ILMU PENDIDIKAN*.
- Raharjo. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: dari Rentjana pelajaran 1997vsampai dengan Merdeka Belajar 2020. *ppkn progresif*.
- Riska, A. (2024). Paradigma Baru Pembelajaran Pkn di Sekolah Dasar dalam Membentuk Karakter Siswa di Era Revolusi industri 4.0. *jurnal ilmiah pendidikan*.
- Wijayantu. (2024). Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Pkn di Sekolah Dasar Dengan Membangun Kesadaran Pluralisme Sejak Dini. *jurnal pendidikan karakter*.